

ABSTRAK

Rizza Alissa: Resolusi Konflik dalam Sengketa PKL dengan Pemerintah Kota Bandung.

Konflik adalah bagian dari sebuah proses interaksi sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan fisik, emosi, perilaku, kebudayaan, dan kepentingan. Konflik antara kelompok Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan Pemerintah dikarenakan adanya perbedaan kepentingan. Pemerintah ingin menerapkan Perda No 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL, jadi Pemerintah Kota Bandung akan menertibkan PKL tersebut dan memindahkannya ke tempat lain. PKL yang berada di Alun-alun enggan untuk ditertibkan dan dipindahkan ke tempat lain karena jika mereka pindah, pendapatannya akan menurun apalagi lokasi tempat mereka pindah jaraknya terlalu jauh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2011 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota kepada Pedagang Kaki Lima Alun-alun Kota Bandung, bagaimana Konflik yang terjadi dalam Sengketa Pedagang Kaki Lima dengan Pemerintah Kota Bandung, bagaimana mekanisme Resolusi Konflik antara Pedagang Kaki Lima dengan Pemerintah kota Bandung.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini yaitu dengan pendekatan Kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini menggambarkan karakteristik suatu kelompok orang tertentu yang tujuannya untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Penelitian mengenai Resolusi Konflik antara PKL dengan Pemerintah menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf dan teori resolusi konflik Johan Galtung. Pendekatan teoritis Dahrendorf adalah paradigma konflik masyarakat yaitu konflik kepentingan diantara kelompok-kelompok yang terkoordinasi secara paksa. Seperti konflik kepentingan antara Pemerintah Kota Bandung (yang memiliki kekuasaan) dengan PKL Alun-alun Kota Bandung (tidak memiliki kekuasaan). Menurut Johan Galtung, konflik sebagai sekumpulan permasalahan yang menghasilkan penyelesaian yang merupakan penciptaan baru. Dalam penyelesaian konflik tersebut Galtung menawarkan beberapa proses perdamaian dalam mengintervensi konflik, yaitu *peace keeping*, *peace making*, *conflict management*, dan *peace building*.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara PKL dengan Pemerintah Kota Bandung adalah konflik kepentingan. Kepentingan-kepentingan yang berbeda ini merupakan konflik struktural dimana kekuasaan secara paksa menjadi sumber konflik. Pemerintah yang memiliki kekuasaan dapat menerapkan kebijakan-kebijakan yang dianggap untuk kepentingan umum kepada masyarakat, termasuk PKL. Akan tetapi kebijakan tersebut tidak diterima oleh kelompok PKL. Kebijakan tersebut dianggap merugikan para PKL, maka muncul tindak perlawanan dari PKL yang akhirnya dapat menimbulkan konflik kekerasan. Untuk menangani konflik tersebut Pemerintah melakukan berbagai upaya resolusi konflik yaitu dengan pendekatan *peace keeping*, *peace making*, *conflict management*, dan *peace building* melakukan komunikasi dan dialog dengan melibatkan seluruh PKL, petugas Satgasus, tokoh agama, dan masyarakat sekitar.